



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS PADJADJARAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MEGA FATIMAH ROSANA
2. Jabatan : DEKAN
3. NHK : 854769

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 1.905.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDUNG , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
2. Tanah Seluas 14610 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
3. Tanah Seluas 700 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 512 m2/150 m2 di KAB / KOTA TASIKMALAYA, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/100 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
6. Bangunan Seluas 15 m2 di KAB / KOTA SUMEDANG, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 2.000.000

1. MOTOR, YAMAHA 4D7 VEGA R 110 CC Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ---

D. SURAT BERHARGA

Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 2.054.022.085

F. HARTA LAINNYA

Rp. ---

Sub Total

Rp. 3.961.022.085

III. HUTANG

Rp. 374.181.825

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.586.840.260



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.